



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **TAUFIK ISMAIL**
2. Jabatan : **KEPALA SEKSI PELAYANAN KEPABEANAN DAN CUKAI V**
3. NHK : **105001**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.129.718.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 91 m²/45 m² di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 319.135.000
2. Tanah Seluas 882 m² di KAB / KOTA TASIKMALAYA, WARISAN Rp. 112.896.000
3. Tanah Seluas 617 m² di KAB / KOTA TASIKMALAYA, WARISAN Rp. 63.551.000
4. Tanah Seluas 3712 m² di KAB / KOTA TASIKMALAYA, WARISAN Rp. 475.136.000
5. Tanah Seluas 795 m² di KAB / KOTA TASIKMALAYA, WARISAN Rp. 159.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **582.000.000**

1. MOTOR, HONDA BLADE SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
2. MOBIL, HONDA CIVIC Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
3. LAINNYA, BROMPTON SEPEDA LIPAT GOLD EDITION Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
4. LAINNYA, BROMPTON SEPEDA LIPAT BLACK GLOSSY BE Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000



5. MOBIL, HONDA CRV Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.
375.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 256.590.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 112.831.335

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 2.081.139.335

III. HUTANG Rp. 177.820.301

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.903.319.034

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.